

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
Vol 6 No 1 2025 hal 14-18

KOORDINASI KEPALA PUSKESMAS DALAM PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK MENANGANAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI BEJANGKAR KABUPATEN BATU BARA

Oleh:

Junika Rossi¹, Nalil Khairiah²

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Email: nalilkhairiah@umsu.ac.id

ABSTRACT

Pemberian Makanan Tambahan merupakan program penurunan stunting untuk bayi atau anak-anak. Program ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas yang menjelaskan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang melayani pasien dengan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah stunting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana koordinasi kepala puskesmas pada program (PMT) pemberian makanan tambahan di wilayah kerja Puskesmas Sei Bejangkar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kepala puskesmas dalam program pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting berlangsung dengan cara bertanggung jawab yaitu berkoordinasi dan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Adanya kerja sama, kerja sama yang dilakukan kepala puskesmas kepada kepala desa dengan cara menjalin silaturahmi dengan kepala desa secara rutin dan berkala serta melakukan pertemuan dengan para kader, pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dijalankan secara terus menerus dan sesuai dengan peraturan Kepmenkes Nomor. HK.01.07/kemenkes/4631/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan pemberian makanan tambahan, tindakan inti koordinasi kepala puskesmas melakukan perencanaan program berkoordinasi dan melakukan pelatihan kepada kader tentang teknisi penyediaan makanan yang sehat dan bergizi

kata kunci : Koordinasi, Stunting, PMT

PENDAHULUAN

Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO, pada tahun 2020 sebanyak 22% atau sekitar 149,2 juta balita di dunia mengalami kejadian stunting (World Health Organization, 2021). Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan menjadi 27,7%.

Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas menjelaskan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang melayani pasien dengan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah stunting.

Puskesmas Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai adalah salah satu Puskesmas yang berperan dalam program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan, Puskesmas Sei Bejangkar terletak di wilayah Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, Pukesmas Sei Bejangkar memiliki beberapa dokter yang mana salah satunya yaitu sebagai Kepala Puskesmas.

Kepala Puskemas sebagai pemimpin bertanggung jawab dalam melaksanakan program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan, untuk melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai tujuan program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan, Peranan Kepala Puskesmas dalam Program

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 14-18

tersebut tidak hanya sebagai penanggung jawab saja, antara lain seperti memimpin pelaksanaan program, membina jalannya program dan mengadakan koordinasi dengan staf penanggung jawab gizi di puskesmas serta melibatkan bidan desa dan para kader posyandu di setiap desa.

Dalam masalah ini suatu program akan berhasil apabila Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan, terjadinya usaha dan kerja sama dengan para bidan desa dan kader posyandu yang ada pada setiap desa, dan dapat terus menerus melakukan upaya pengawasan pada program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan. Namun di wilayah kerja Puskesmas Sei Bejangkar belum menunjukkan keberhasilan pada program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan di duga karena masih rendahnya tanggung jawab kepala puskesmas.

Untuk menggerakkan program ini maka di perlukan koordinasi, koordinasi akan berdampak efiensi jika tanggung jawab Kepala Puskesmas dalam menggerakkan program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan terlaksana dengan baik guna memenuhi dan mempercepat peningkatan penurunan stunting. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran pimpinan puskesmas dalam memberikan arahan, motivasi dan tuntunan kepada bawahannya agar terwujud program (PMT) Pemberian Makanan tambahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif, (Sugiyono 2017: 8). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang di dapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Sugiyono (2017: 9), yaitu bahwa metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi yang dilakukan pada saat penelitian mengenai koordinasi kepala puskesmas dalam progam (PMT) pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting di wilayah kerja puskesmas Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara Hasil dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tetapkan :

1. Adanya Tanggung Jawab Pemimpin

Sebagai pemimpin di Puskesmas, Kepala Puskesmas memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting di masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemanfaatan fasilitas yang tersedia tetapi juga harus sejalan dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Puskesmas juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kerja sama yang solid dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kader kesehatan, dan masyarakat. Koordinasi ini sejalan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan. Dengan mengikuti kebijakan ini, Kapus dapat melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi anak-anak yang mengalami stunting, serta

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 14-18

memastikan bahwa distribusi makanan tambahan dilakukan dengan tepat sasaran. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat dukungan masyarakat terhadap program kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk keberhasilan PMT.

Selain itu, Kepala Puskesmas harus melaksanakan fungsi koordinasi sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini termasuk mengikuti pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan program kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Pengelolaan Data Kesehatan, Kepala Puskesmas harus menyediakan laporan berkala mengenai pelaksanaan PMT, termasuk data tentang jumlah anak yang menerima makanan tambahan, jenis makanan yang diberikan, serta dampak program terhadap status gizi anak-anak.

2. Adanya Kerja Sama Kepada Pihak Yang Terlibat

Kerja sama Kepala Puskesmas Sei Bejangkar dengan pihak lain yaitu kepada Kepala Desa dan Kader posyandu, pada program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan sudah terlaksananya kerja sama yang baik antara Kepala Puskesmas Sei Bejangkar dan Kepala Desa. Kerja sama yang erat antara Kepala Puskesmas Sei Bejangkar dengan Kepala Desa dan kader Posyandu menjadi elemen penting dalam keberhasilan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Sinergi ini menciptakan kolaborasi yang produktif untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah stunting pada anak. Kepala Puskesmas berperan sebagai penggerak utama, mendorong setiap anggota tim untuk berkontribusi secara aktif dalam setiap aspek pelaksanaan PMT, mulai dari pengumpulan data hingga distribusi makanan tambahan.

Melalui koordinasi yang solid dan kerja sama yang efektif, program PMT di Puskesmas Sei Bejangkar dapat berjalan dengan baik, memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan makanan bergizi yang diperlukan. Kolaborasi yang baik ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan program tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan pihak puskesmas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

3. Adanya Pelaksanaan Program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan Secara Terus Menerus

Koordinasi dalam pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah proses berkelanjutan yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab utama Kepala Puskesmas. Sebagai pemimpin, kepala puskesmas perlu menjalankan tugas ini dengan mematuhi berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan instruksi dari Dinas Kesehatan setempat. Evaluasi rutin merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan, yang meliputi penilaian awal terhadap efektivitas program serta pengukuran dampak jangka panjangnya terhadap angka stunting di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Kepala Puskesmas harus aktif memantau perkembangan program PMT, berdiskusi dengan tim untuk menilai hasil evaluasi, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam peraturan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak, Kepala Puskesmas dapat memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terencana dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pendekatan yang berkesinambungan dan penyesuaian strategi pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi, Kepala Puskesmas tidak hanya meningkatkan efektivitas program PMT tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
Vol 6 No 1 2025 hal 14-18

4. Adanya Tindakan Inti Dari Koordinasi Kepala Puskesmas Dalam Menjalankan Program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan.

Tindakan inti dari koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas adalah memastikan bahwa seluruh elemen dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) beroperasi sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada memadai, pelayanan yang diberikan berkualitas, dan tidak ada kekosongan dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait PMT.

Kepala Puskesmas harus bertindak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku dalam penanganan stunting, dan mengikuti pedoman yang ditetapkan agar program ini tepat sasaran dan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang mencakup pembagian tugas yang jelas, memupukan semangat kerja sama di antara para pelaksana, dan perencanaan langkah-langkah koordinasi yang matang, Kapus dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dalam melaksanakan program PMT, Kepala Puskesmas juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan untuk Menanggulangi Gizi Buruk.

Ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan program PMT, Kepala Puskesmas harus mampu memberikan solusi yang tepat. Jika petugas mengalami kesulitan dalam mewujudkan program yang efektif dan efisien, Kepala Puskesmas perlu mengingatkan, memotivasi, dan membimbing mereka untuk meningkatkan kinerja. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif, di mana setiap anggota tim merasa didukung dan diberdayakan untuk memberikan yang terbaik. Dengan langkah-langkah koordinasi yang solid dan dukungan yang berkelanjutan, program PMT dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, serta selaras dengan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Program (PMT) Pemberian Makanan Tambahan merupakan kegiatan yang dilakukan dua minggu sekali, program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja puskesmas sei beige kar, untuk mewujudkan pelaksanaan program PMT yang baik di perlukan koordinasi kepala puskesmas yang berkelanjutan. Koordinasi adalah mengarahkan, mrngintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanggung jawab pemimpin (kepala puskesmas), kepala puskesmas menggerakkan tim dengan cara penjadwalan jam kerja, disiplin, pengawasan secara langsung, monitoring ke lapangan, penjadwalan yang tepat , kerja sama kepada masyarakat melalui bidan desa dan aparat desa dan selalu dibangkitkan semangatnya dalam bekerja. Pelaksanaan program yang dijalankan secara terus menerus akan berjalan dengan baik karena adanya penjadwalan program PMT setiap minggunya. Tujuan bersama dalam menjalankan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) menjadikan anak-anak lebih sehat dan terhindar dari stunting, tujuan lainnya seperti terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak Puskesmas dan Kepala Desa serta para Kader.

Melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sangat membantu terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan dan penanganan stunting. Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sudah berjalan sangat baik dengan adanya koordinasi, karena sebelum melaksanakan kegiatan, semua anggota tim sudah mempunyai jadwal kerja wilayah yang telah ditentukan.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 14-18

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2019). Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Deepublish.
- Astari, L. D., Nasoetion, A., & Dwiriani, C. M. (2006). Hubungan konsumsi ASI dan MP-ASI serta kejadian stunting anak usia 6-12 bulan di Kabupaten Bogor.
- Dinata, A. (2018). Pendampingan Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam. NGABDIMAS-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1-5.
- Handoko, T. Hani. (2016). Manajemen. Yogyakarta : BPFE
- Handayaniingrat, Soewarno. (2011). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manejemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasibuan, Malayu. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.,
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Ikeda, N., Irie, Y., & Shibuya, K. (2013). Determinants of reduced child stunting in Cambodia: analysis of pooled data from three demographic and health surveys. Bulletin of the World Health Organization, 91, 341-349.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Sari, M., & Rahmi, N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua pada Anak Balita di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Journal of Healthcare Technology and Medicine, 3(1), 94-107.
- Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sutarto. (2015). Dasar-Dasar Organisasi, Cetakan Keduapuluh Tiga. Yogyakarta: UGM Press.
- World Health Organization. World Health Statistics. (2012). 2. Badan Pusat Statistik. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012.
- WHO. (2015). Stunting in nutshell [internet]. World Health Organization. 2015 [cited 2021 Jun 10]. Available from: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>